

Title : Peran dan Fungsi Agama dalam Menyikapi Multikulturalisme di Indonesia dengan Konsep Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pilar Kesatuan dan Persatuan

Author(s) : (1) Muhammad Yusuf, (2) Maulana Shihabudin, (3) Puji Lopa Dwi Cahya Permata Hati, (4) Asima Romian Angelina, (5) Adam Farhansyah

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article, Competition

Topics : Religion, multiculturalure

**Peran dan Fungsi Agama dalam Menyikapi Multikulturalisme di Indonesia dengan
Konsep Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pilar Kesatuan dan Persatuan**

Muhammad Yusuf, Maulana Shihabudin, Puji Lopa Dwi Cahya Permata Hati, Asima
Romian Angelina, Adam Farhansyah

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : 1111190160@untirta.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang tergolong sangat banyak. Banyaknya penduduk di Indonesia tentunya menandakan terdapat banyaknya keberagaman atau multikultural dari berbagai aspek seperti keberagaman agama, suku, ras dan lainnya. Terdapat banyaknya perbedaan atau keberagaman dari berbagai aspek memiliki potensi yang besar akan terjadinya perpecahan. Oleh karena itu perlunya suatu pondasi yang dapat mencegah terjadinya perpecahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat deskriptif analitis. Penulis memaparkan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan bagaimana peran dan fungsi agama dalam menyikapi multikulturalisme di Indonesia dengan konsep kebhinekaan sebagai pilar kesatuan dan persatuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan agama menjadi salah satu pondasi pencegah terjadinya perpecahan karena agama adalah pedoman moral dan aturan perilaku sosial dalam masyarakat. Selain itu agama memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar ritual menyembah Tuhan tetapi juga pegangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya anjuran untuk saling menghormati satu sama lain tanpa membedakan baik itu berbeda dari sisi agama, ras, suku, dan lainnya.

Kata Kunci : Indonesia, Agama, Multikulturalisme

Abstrack

Indonesia is a country that has a very wide area with a very large population. The large number of people in Indonesia certainly indicates a lot of diversity or multiculturalism from various aspects such as religious, ethnic, racial and other diversity. There are differences or diversity from various aspects that have great potential for division. Therefore the need for a foundation that can prevent the occurrence of such divisions. This research is descriptive analytical research. The author describes a normative juridical approach, namely primary legal materials, secondary legal materials and

tertiary legal materials. The purpose of writing is to explain how the role and function of religion in responding to multiculturalism in Indonesia with the concept of diversity as a pillar of unity and unity. The results show that the existence of religion is one of the foundations to prevent divisions because religion is a moral guide and rules of social behavior in society. In addition, religion has a big role in human life, not just a ritual to worship God but also a guide to living daily life including respecting each other without discriminating whether it is different from the side of religion, race, ethnicity, religion and other.

Keywords : Indonesia, Religion, Multiculturalism

A. Pendahuluan

Agama menjadi salah satu kebutuhan manusia. Di dalam sebuah masyarakat, agama menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan terutama dalam kehidupan spiritual. Di sisi lain, agama datang belakangan dengan membawa nilai-nilai baru yang menuntut penganutnya menaati sebuah perintah dan menjauhi larangannya. Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Oleh karenanya, disebut dengan multikulturalisme. Berasal dari kata multi (plural) dan kultural (tentang budaya), multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keragaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini tentu ada kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia terlihat dari beberapa fakta berikut: tersebar dalam kepulauan yang terdiri atas 13.667 pulau (meskipun tidak seluruhnya berpenghuni), terbagi ke dalam 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa, memeluk beragam agama dan kepercayaan yang menurut statistik: Islam 88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1% (dengan catatan ada pula penduduk yang menganut keyakinan yang tidak termasuk agama resmi pemerintah, namun di kartu tanda penduduk menyebut diri sebagai pemeluk agama resmi pemerintah), dan riwayat kultural percampuran berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.

Menurut Parekh (2001), ada tiga komponen multikulturalisme, yakni kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik, melainkan cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi dasarnya—dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.

Walau dengan jelas dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta kebebasan dalam beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kemudian direkatkan kembali dengan filosofi kebhinekaan yang dianut, Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Islam dan berkembang berbagai aliran-aliran agama. Keberagaman pemahaman beragama sering kali menimbulkan konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Padahal agama tidak hanya sebatas mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Karenanya agama juga mengatur bagaimana kita hidup dengan sesama manusia dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Berdasarkan keyakinan pada Tuhan, perilaku baik manusia mengikuti aturan Tuhan. Aturan itu diperlukan agar manusia tetap berada di jalan yang menuju tercapainya tujuan hidup atau berada di jalan yang diperintahkan Tuhan, yang tidak lain dilakukan demi kebaikan manusia itu sendiri (Ibrahim & Akhmad, 2014).

Ada juga yang memandang keberagaman ini dari sisi kewarganegaraan. Beragama merupakan sebuah kebajikan publik (*public virtue*) yang harus dijaga dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat sendiri. Dalam sebuah masyarakat sipil, masyarakat menegakkan aturan main yang bisa saja bersumber dari ajaran agama untuk menjaga kebersamaan sebagai warga negara.

Menurut teori fungsional, masyarakat merupakan suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan, yang mempolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dipandang sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam pandangan Broom dan Selznick, sebagaimana dikutip J.Dwi Narwoko, setiap masyarakat bisa tetap eksis dan bertahan (*survive*) karena adanya sifat kooperatif dari anggota-anggotanya. Sifat kooperatif antar warga masyarakat bisa diperoleh melalui jalur sosialisasi, dan dalam konteks ini agama berfungsi sebagai sumber utama proses sosialisasi dimaksud. Oleh karena itulah, agama berperan memberikan sokongan psikologis, yang mana agama selain membantu orang dari kebingungan dunia dan menawarkan jawaban tentang berbagai permasalahan, dan juga memberikan kekuatan moral.

Dengan kata lain, agama yang dipelajari dalam sosiologi bukanlah isi dari agama, tetapi lebih pada agama sebagai institusi, agama sebagai salah satu aspek dari tingkah laku kelompok serta peranan yang dimainkannya dalam kehidupan masyarakat. Berangkat dari pokok-pokok pikiran di atas, maka tulisan ini mencoba untuk melihat agama sebagai realitas sosial dan perannya dalam menyikapi multikulturalisme kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan prinsip kesatuan.

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*Library Research*) atau data sekunder belaka.[1] Penelitian normatif ini menggunakan berbagai data sekunder

berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku, artikel jurnal, kamus hukum, dan internet.

C. Pembahasan

a. Multikulturalisme

Multikulturalisme berasal dari kata multi (plural) dan kultural (tentang budaya). Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keragaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat.[2]

Indonesia merupakan merupakan negara yang masyarakatnya majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras, adat-istiadat, golongan, kelompok dan agama. Kondisi tersebut secara natural akan menciptakan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemajemukan tersebut tercipta berdasarkan peristiwa-peristiwa historis di masa lampau dan juga didukung oleh kondisi geografis dari negara Indonesia. Keduanya menjadi sebuah alasan yang konkrit atas terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia.

Pierre L. van den Berghe membuat karakteristik masyarakat multikultural ini, yaitu:

- a) Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain;
- b) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga lembaga yang bersifat nonkomplementer;
- c) Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
- d) Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
- e) Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta
- f) Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain[3]

Sebagai negara dengan kemajemukan yang tinggi baik dari segi ras, suku, maupun agama, istilah multikulturalisme sudah tidak asing bagi warga negara Indonesia. Terciptanya paham atau konsepsi terkait

multikulturalisme didahului atas *the need of recognition*, atau kebutuhan akan pengakuan terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi sebuah realita dalam kehidupan bermasyarakat. Multikulturalisme merupakan kontradiksi dari paham Monokulturalisme, paham monokulturalisme menghendaki kesatuan budaya secara normatif, karena akhir dari konsep tersebut adalah sebuah homogenitas

Masyarakat yang majemuk di dalamnya memiliki potensi-potensi yang dapat memberikan ketidakharmonisan antar sesama dan perubahan yang terus-menerus. Potensi tersebut juga memungkinkan akan terjadinya konflik dalam masyarakat, maka diperlukan sebuah manajemen konflik yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam mempersiapkan manajemen konflik tersebut merupakan beban yang cukup berat, karena konsep atau pemahaman terkait multikulturalisme harus tersosialisasi ke dalam seluruh cakupan masyarakat di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan saling menyadari tentang disparitas yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat multikultural merupakan konstruksi dari sebuah negara dan bangsa yang memperhatikan dengan komprehensif terkait keragaman sebuah golongan yang terdapat di masyarakat. Karena, negara akan dianggap tidak adil apabila memandang suatu golongan tertentu dan memberikan hak-hak eksklusif bagi kelompoknya karena unsur SARA, dan tidak memberikan hak-hak secara penuh kepada golongan yang lain baik individu maupun masyarakat. Apabila terjadi seperti itu di suatu negara maka konflik antar suku, agama, dan ras akan tidak bisa dihindari. Kemajemukan ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan dan harus dirawat sedemikian mungkin agar kehidupan masyarakat yang harmonis dengan berlandaskan gotong royong dan terciptanya masyarakat adil dan makmur dapat terwujud di Indonesia.

b. Agama

Dalam pandangan sosiolog dan antropolog agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai suatu yang gaib dan suci.^[4] Jadi agama adalah pedoman moral dan aturan perilaku sosial dalam masyarakat. agama memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia, bukan hanya sekedar ritual untuk menyembah tuhan tetapi juga pegangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Agama dalam kehidupan individu sendiri adalah suatu sistem moral yang berisi norma-norma tertentu. Secara garis besar norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam berperilaku dan bersikap agar

selaras dengan keyakinan yang dianut. norma itu memiliki nilai kemudian menjadi pendorong dalam kehidupan. tidak heran pada level tertentu seseorang siap mengorbankan hidup dalam mempertahankan nilai karena sudah menjadi prinsip. nilai dapat dilihat dari dua segi, satu segi intelektual dan satu lagi dari segi emosional.

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang memiliki keyakinan terhadap tuhan. hal ini bisa dilihat dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi "ketuhanan Yang Maha Esa". Di Indonesia sendiri terdapat aliran-aliran agama dengan mayoritas pemeluk agama Islam. ada 5 agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi daya tarik sendiri namun aspek tersebut juga mempunyai pengaruh yang harus diwaspadai. Khususnya dalam hal religious diversity, aspek ini sangat penting mengingat karena setiap agama mempunyai eksklusivitas ajaran yang apabila salah satu penganut agama menyinggung agama lain, maka efeknya timbul perpecahan dan kontestasi dalam beragama.

Persoalan mengenai kerukunan umat beragama bersifat kompleks. persoalan tersebut timbul karena agama karena tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja mengenai dirinya sendiri namun juga faktor lingkungan yang berkembang di sekelilingnya. Faktor tersebut teridentifikasi menjadi faktor internal (agama) dan faktor eksternal (politik, keadaan sosial, kebudayaan, keluarga, kepemimpinan, globalisasi).^[5]

- faktor agama

peran faktor agama dalam hubungan beragama berkaitan dengan ajaran agama, interpretasi umat pada ajaran agama, pembuatan rumah ibadah, penyebaran agama dan mental dari umat itu sendiri.

- faktor politik

peran faktor politik dalam hubungan beragama berkaitan dengan kekuasaan, tentang siapa yang berpengaruh dan dipengaruhi dalam pemerintahan. agama dapat berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam situasi-situasi politik yang mempengaruhi hubungan antar agama.

- faktor keadaan sosial

faktor ini dapat mempengaruhi kerukunan beragama karena terdapat kelas atau komunitas yang memiliki keadaan sama. contohnya ketidakadilan, kondisi ekonomi atau hal lain yang menimbulkan kelas sehingga dari kelas tersebut menciptakan relasi antar umat beragama.

- faktor kebudayaan

kebudayaan memiliki nilai atau kepercayaan hakiki bagi masyarakat yang menganutnya. nilai dan kepercayaan yang dipegang dan dijalani oleh masyarakat ini membentuk ikatan kultural dan mempengaruhi hubungan antar umat beragama.

- faktor keluarga

faktor ini memiliki pengaruh bagi hubungan antar umat beragama karena di Indonesia nilai kekeluargaan sangat dihargai dan membentuk ikatan darah.

- faktor pemerintah

sikap pemerintah berpengaruh pada hubungan antar umat beragama, dimana sikap yang diambil harus adil dan merata. sikap yang diskriminatif dapat menimbulkan gejolak pada hubungan tersebut.

- faktor kepemimpinan

peran para pemuka agama juga mempengaruhi pada hubungan antar umat beragama, mereka dijadikan teladan dan mengarahkan umat.

- faktor globalisasi

gelombang globalisasi yang semakin pesat mempengaruhi hubungan antar umat beragama karena menyebabkan perubahan perilaku dan akses ke masyarakat yang lebih luas.

Peranan agama dalam merawat kebhinekaan menjadi sangat penting karena dari keyakinan maka akan selaras dengan perbuatan dan perilaku kemudian dijadikan nilai dalam pedoman hidup. Sidharta Gautama menjelaskan tentang personalitas Budha yaitu tindakan tanpa kekerasan, tiga tanda, pengabaian keinginan, dan status tertinggi bagi pencarian nirwana. Nirwana adalah kebebasan tubuh, ujaran, dan pikiran secara total dalam kesempurnaan kebijaksanaan, cinta, dan energi.^[6] Kemudian Kong Hu Cu yang mengajarkan sebuah kebaikan yang memberikan keindahan kepada sebuah komunitas. Yesus juga mengajarkan bahwa orang-orang di sekitar kita adalah sesama kita, bukan musuh. Jadi, berbuat baiklah kepada siapa pun yang memerlukan pertolongan. Nabi Muhammad juga mengajarkan umatnya tentang menyayangi makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi makhluk yang ada di langit. Kemudian Nabi juga mengajarkan bahwa Islam itu menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam (*rahmat lil alamin*).

Dari ajaran-ajaran tersebut, dapat dilihat bahwa peranan semua agama yang selalu mengajarkan kasih sayang, kebaikan, kedamaian dan cinta antar sesama. Sehingga tidak ada kaitan keberadaan agama merusak kebhinekaan yang di dalamnya banyak kebaikan. Jadi dalam

konteks kebhinekaan dapat ditarik bahwa kemajemukan dan agama merupakan bagian didalamnya. Menjaga keberagaman pemeluk agama sama dengan menjaga kebhinekaan yang menjadi semboyan negara.

c. Konsep Bhinneka Tunggal Ika



Gambar 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika

Negara dan bangsa Indonesia merupakan hasil dari konsensus para pendiri bangsa yang berasal dari suku, agama, maupun ras yang beragam. Dapat dilihat dari realitas sosio historis perlawanan terhadap penjajah yang awalnya hanya bersifat parsial bertransformasi menjadi perlawanan kolektif dengan mengutamakan kepentingan Bersama (*common interest*) yang berdasarkan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Semangat nasionalisme tersebut diawali dengan Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan atas “Satu tanah air, bangsa dan Bahasa”. Lalu mencapai masa puncaknya ialah pembacaan Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dilihat dari realitas sosio historis tersebut dapat diambil sebuah makna bahwa bangsa ini hanya dapat bersatu apabila adanya rasa saling toleransi dan menghormati atas segala perbedaan dan kemajemukan di dalamnya. Indonesia lahir karena para pelaku sejarah tidak mengedepankan egosentris diantara mereka, namun bukan berarti menghilangkan identitas diri masing-masing suku, agama atau ras. Usaha tersebut agar menghilangkan rasa keterasingan antar golongan dalam sosial masyarakat tersebut.

Bhinneka Tunggal Ika secara konstitusional tertuang dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Dalam lambang negara semboyan Bhinneka Tunggal Ika terukir pada Burung Garuda Pancasila yang mencengkeram dengan erat semboyan tersebut dengan kedua kakinya. Apabila diterjemahkan Bhinneka Tunggal Ika, kata *bhinneka* berarti “beraneka ragam”. Kata *neka* dalam Bahasa sansekerta memiliki makna “macam” dan menjadi pembentuk kata

“aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata *Tunggal* berarti “satu”, kata *Ika* berarti “itu”. Secara harfiah *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan “beraneka satu itu” yang bermakna meski berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.[7] Negara Republik Indonesia yang terdiri beraneka ragam budaya Bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan itu memiliki kesatuan yang tercakup di dalam semboyan tersebut.[8]

“Bhinneka Tunggal Ika” dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular saat sekitar abad ke-14 atau ketika masa kerajaan Majapahit. Semboyan tersebut pada awalnya menandai sebuah toleransi keagamaan yang terjadi pada masa itu, yaitu antara agama Hindu dan Buddha yang dapat hidup saling berdampingan dan mewujudkan persatuan, itupun diambil berdasarkan pengalaman religius Mpu Tantular yang beragama Buddha Tantrayana yang hidup di masa kerajaan Majapahit dengan corak agamanya yaitu Hindu.

Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi pembahasan saat sidang terbatas BPUPKI, hingga akhirnya pada tanggal 11 Februari 1950 lambang burung garuda yang mencengkeram kalimat bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika” dijadikan sebagai lambang secara resmi pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Sikap toleransi dan berlapang hati ditampilkan oleh para pendiri bangsa saat itu yang mayoritas beragama Islam, namun tidak keberatan bahwa semboyan negara Indonesia diambil dari Bahasa Sansekerta dan merupakan peninggalan sejarah Hindu-Budha di Nusantara.

Kebhinekaan yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan modal awal dalam kemajuan negara Republik Indonesia. Dimana terciptanya suatu kondisi yang harmonis antara golongan masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan saling bekerja sama dalam segala aspek atau lingkup baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun industri.

D. Kesimpulan

Multikulturalisme merupakan salah satu hal yang patut diperhatikan dalam bermasyarakat di negara Indonesia ini. Masyarakat multikultural merupakan konstruksi dari sebuah negara dan bangsa yang memperhatikan dengan komprehensif terkait keragaman sebuah golongan yang terdapat di masyarakat. Masyarakat yang majemuk di dalamnya memiliki potensi-potensi yang dapat memberikan ketidakharmonisan antar sesama dan perubahan yang terus-menerus. Potensi tersebut juga memungkinkan akan terjadinya konflik dalam masyarakat karena, negara akan dianggap tidak adil apabila memandang suatu golongan tertentu dan memberikan hak-hak eksklusif bagi kelompoknya karena unsur SARA, dan tidak memberikan hak-hak secara penuh kepada golongan yang lain baik individu maupun masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi di suatu negara maka konflik antar suku, agama, dan ras tidak akan bisa dihindarkan. Maka diperlukan sebuah manajemen konflik yang dipersiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam mempersiapkan manajemen konflik tersebut merupakan

suatu beban yang cukup berat, karena konsep atau pemahaman terkait multikulturalisme harus tersosialisasi ke dalam seluruh cakupan masyarakat di Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, saling menghormati dan saling menyadari tentang disparitas yang terjadi di masyarakat.

Peranan agama dalam merawat kebhinekaan menjadi salah satu solusi manajemen konflik untuk mengatasi permasalahan multikultural yang terjadi di Indonesia. Peran dan fungsi agama sangat penting karena dari keyakinan akan selaras dengan perbuatan dan perilaku kemudian dijadikan nilai dalam pedoman hidup. Di setiap agama diajarkan berbagai hal positif seperti kasih sayang, kebaikan, kedamaian dan cinta antar sesama dimana hal-hal tersebut akan menjadi solusi dari berbagai masalah yang terjadi khususnya yang berkaitan dengan perilaku bermasyarakat. Sehingga tidak ada kaitan keberadaan agama merusak kebhinekaan yang di dalamnya banyak kebaikan. Jadi dalam konteks kebhinekaan dapat ditarik bahwa kemajemukan dan agama merupakan bagian didalamnya. Menjaga keberagaman pemeluk agama sama dengan menjaga kebhinekaan yang menjadi semboyan negara.

Apabila dilihat dari realitas sosio historis bangsa Indonesia dapat diambil sebuah makna bahwa bangsa ini hanya dapat bersatu apabila adanya rasa saling toleransi dan menghormati atas segala perbedaan dan kemajemukan di dalamnya. Kebhinekaan yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan modal awal dalam kemajuan negara Republik Indonesia. Dimana terciptanya suatu kondisi yang harmonis antara golongan masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan saling bekerja sama dalam segala aspek atau lingkup baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun industri. Dengan begitu kemajemukan ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dirawat sedemikian mungkin demi kehidupan masyarakat yang harmonis dengan berlandaskan gotong royong dan terciptanya masyarakat adil dan makmur dapat terwujud di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana.
- Sinar Grafika. 1993. *Garis-Garis Besar Haluan Negara* . Jakarta : Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Artikel Jurnal

- Fu'adi, Athok. 2012. Peran Pendidikan Agama dalam Membentuk Manusia yang Berkeadaban Publik. *Millah*, 11 (2).
- Ibrahim, Rustam. 2013. Pendidikan Multikultural : Pengertian, Prinsip dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *ADDIN*, 7 (1).
- Irhandayaningsih, Ana. 2009. Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia. *Humanika*, 15 (2).
- Mubit, Rizal. 2016. Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia. *Episteme*, 11 (1).
- Mulyadi. 2016. Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, 6, (2)
- Pieter, Jeneman dan John A. Titaley. 2015. Hubungan antar Agama dalam Kebhinekaan Indonesia. *Jurnal Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Kristen (APTAK)*, 2 (1).
- Pursika, I Nyoman. 2009. Kajian Analitik Terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 42 (1).
- Sari, Diana Ana. 2019. Makna Agama dalam Kehidupan Modern. *Cakrawala : Jurnal Studi Islam*, 14 (1).
- Taufik, Ahmad. 2019. Agama dalam Kehidupan Individu. *Edification*, 1 (1).
- Triguna, IB.G. Yudha. 2019. Kebhinekaan Bangsa Indonesia : Urgensi dan Relevansinya dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Dharmasmrti Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan*, 10 (2).
- Zaini, Muhammad. 2016. Kontribusi Agama Bagi Kemajuan Sosial. *Substantia*, 18 (1).

Situs Web dan Internet

- UnasNews. 2020. Agama untuk Kebhinekaan. <https://unasnews.id/agama-untuk-kebinekaan/> diakses 29 agustus 2021 pukul 12.41

